DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arikunto, Suharsimi. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Bina Aksara.

Djauhari M.A. (2008). *Implementasi Kebijakandan Pelyanan Publik : Teori dan Praktek*. Bandung : Perpustakaan Prof. Dr. Doddy A. Tisnaamidjaja.

Dwiyanto A Dkk. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Edisi 2 Yokyakarta : Gajah Mada University Press.

Halim A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Bandung : Refika Aditama.

Handayaningrat, Soewarno. (1994). *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Masagung.

Harahap, Sofyan S. (2001). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Pustaka Quantum.

Hardjanto S. (2008). "Perbaikan Sitem Akuntabilitas, Perlu Analisis dan Studi yang Memadai". *Warta Pengawasan. 15.* 22 – 24

Hasibuan, Malayu SP. (2005). *Organisasidan Motivasi*. Jakarta : PT.Bumi Aksara

Makmur, (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : Refika Aditama.

----------. (2007). *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

----------. (2007). *Patologi serta Terapinya dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Bandung : Refika Aditama.

----------. (2009). *Teori Manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung : Refika Aditama.

Maman U. (2004). *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Agnini

Rasul S. (2008). "Lahirnya Konsep Akuntabilitas Di Indonesia". *Warta Pengawasan. 15.* 15- 17.

Rohman A. (2008). “Kalau Presiden Ingin Menigkatkan Akuntabilitas, Seyogyanya Peran BPKP Ditingkatkan”. *Warta Pengawasan. 15.* 24 – 26.

Safrudin A. (1965). *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Bandung : Sumur.

Siagian S.P. (1986). *Eksekutif yang Efektif*. Jakarta : Gunung Agung

----------. (2008). *FilsafatAdministrasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Sitomurang V dan Juhir J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta

Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta

----------. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta

Winardi. (2000). *Manajer dan Manajemen*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

B. Sumber-sumber lain

Lembaga Administrasi Negara. (2003), *Warta Aneka Informasi Administrasi*. Jakarta: Pusat Informasi Administrasi Negara Bidang Dokumentasi dan Publikasi Lembaga Administrasi Negara.

Soelendro A. (2004). “*Makalah Peningkatan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah”*. Makassar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerinatahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 23 Tahun 2007, Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 2010, Tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 Tahun 1996, Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.